



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIREBON**

<https://cirebonkota.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIREBON 2021

ISSN :
Nomor Publikasi : 32740. 2201
Katalog BPS : 4102004.3274

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 56 halaman

NASKAH : Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis

GAMBAR KULIT : Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis

DITERBITKAN OLEH : Badan Pusat Statistik Kota Cirebon

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIREBON 2021

Tim Penyusun

Pengarah	: Joni Kasmuri, SST, SE, ME
Penanggung Jawab	: Ipan Parin Sopian, S.Si, M.Ec.Dev
Naskah	: 1. Agung Nur Rakhmawati , SST 2. Budi Utami, SST
Pengolah Data	: BPS
Gambar Kulit	: Muhammad Maftuhin, SST
Penyunting	: Ipan Parin S, S.Si, M.Ec.Dev

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2021 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cirebon antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Barat 2015-2025 Hasil Supas 2015.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cirebon

Joni Kasmuri, SST SE ME
NIP. 196801181989021001

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	8
BAB I Kependudukan	
1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk ..	12
1.2 Kepadatan Penduduk	13
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	14
1.4 Status Perkawinan	15
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	17
BAB II Kesehatan	
2.1 Status Kesehatan	20
2.2 Penolong Persalinan.....	24
BAB III Pendidikan	
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	26
3.2 Partisipasi Sekolah	27
BAB IV Ketenagakerjaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	32
BAB V Pola Konsumsi	
Pengeluaran Rumah Tangga	38
BAB VI Perumahan dan Lingkungan	
6.1 Kualitas Rumah Tinggal	42
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	43
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	45
BAB VII Kemiskinan	
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	49
7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	50
BAB VIII Sosial Lainnya	
8.1 Teknologi Infomasi	54
8.2 Perlindungan Sosial.....	55

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. APS dan APM Penduduk Kota Cirebon, 2019-2021	28
Tabel 2. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon Menurut Gender, 2019-2020.....	29
Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan, 2018-2021.....	38

<https://cirebonkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2021	13
Grafik 2. Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2021	13
Grafik 3. Struktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2021 (000 jiwa)	15
Grafik 4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Perkawinan, 2019-2021	16
Grafik 5. Persentase Penduduk 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019-2021	17
Grafik 6. Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB Tahun 2020 dan Tahun 2021	18
Grafik 7. Umur Harapan Hidup Kota Cirebon, 2015-2021	21
Grafik 8. Angka Kesakitan, 2016-2021	22
Grafik 9. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2016-2021	23
Grafik 10. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir, 2019-2021	24
Grafik 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019-2021	27
Grafik 12. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dan Angkatan Kerja, 2021	33
Grafik 13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2021	34
Grafik 14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021	35
Grafik 15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021	36
Grafik 16. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021	43

Grafik 17.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2020-2021	44
Grafik 18.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2020-2021	45
Grafik 19.	Jumlah Penduduk Miskin, 2019-2021 (Maret, ribuan jiwa)	50
Grafik 20.	Garis Kemiskinan, 2019-2021 (Rupiah/ Kapita/Bulan)	51
Grafik 21.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2019-2020	52
Grafik 22.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2019-2021	52
Grafik 23.	Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2021	54
Grafik 24.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial, 2021	55

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab I

Kependudukan

<https://cirebonkepopops.go.id>

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Teori Malthus menjelaskan bahwa pertambahan jumlah penduduk mengikuti deret geometri. Jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi kendala pembangunan apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, data kependudukan diperlukan dalam perencanaan pembangunan antara lain penyediaan fasilitas pelayanan publik, penyediaan tenaga terampil maupun ahli, pembangunan infrastruktur, dan penentuan program yang tepat sasaran.

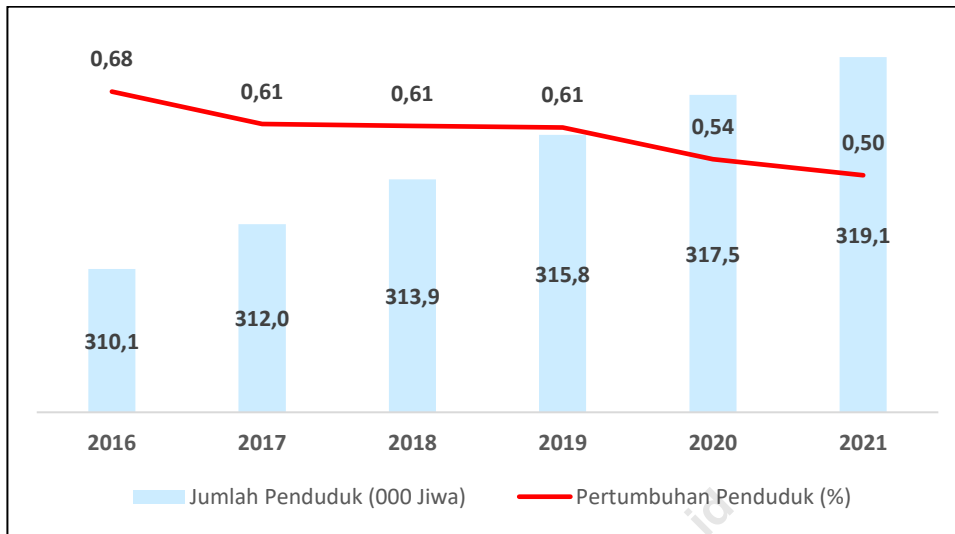
Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi menjadi sebuah kesempatan emas ketika dapat memanfaatkannya dengan optimal. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi modal Indonesia menjadi negara maju.

1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025, penduduk Kota Cirebon pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 319,1 ribu jiwa. Metode yang digunakan dalam penghitungan angka proyeksi ini adalah metode geometrik, yang menggunakan asumsi jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Laju pertambahan penduduk dianggap sama untuk setiap tahun.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 50.172,2 ribu jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 24.728,5 ribu jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 25.374,8 ribu jiwa. Apabila dibandingkan, jumlah penduduk Kota Cirebon sekitar 0,64 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.

Grafik 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Cirebon, 2016-2021

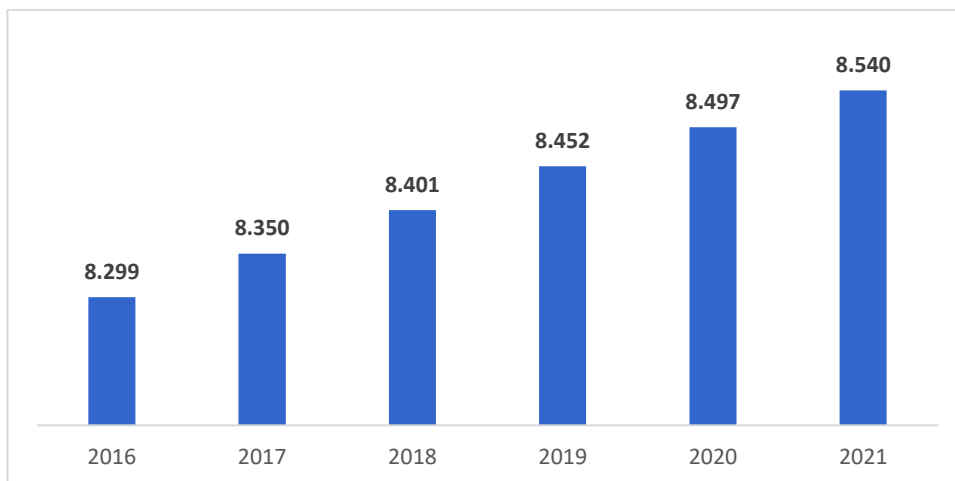


Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

1.2 Kepadatan Penduduk

Selain jumlah penduduk, persoalan yang terjadi di kota adalah kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata antar wilayah. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk Kota Cirebon sebesar 8.540. Angka tersebut mempunyai makna bahwa, pada setiap 1 km² terdapat 8.540 jiwa penduduk. Kepadatan jumlah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlahnya.

Grafik 2.
Kepadatan Penduduk Kota Cirebon, 2016-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk Kota Cirebon menurut jenis kelamin adalah sama. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin penduduk Kota Cirebon pada tahun 2021 sebesar 100. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan yang tinggal di Kota Cirebon terdapat 100 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 1.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Cirebon 2018-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

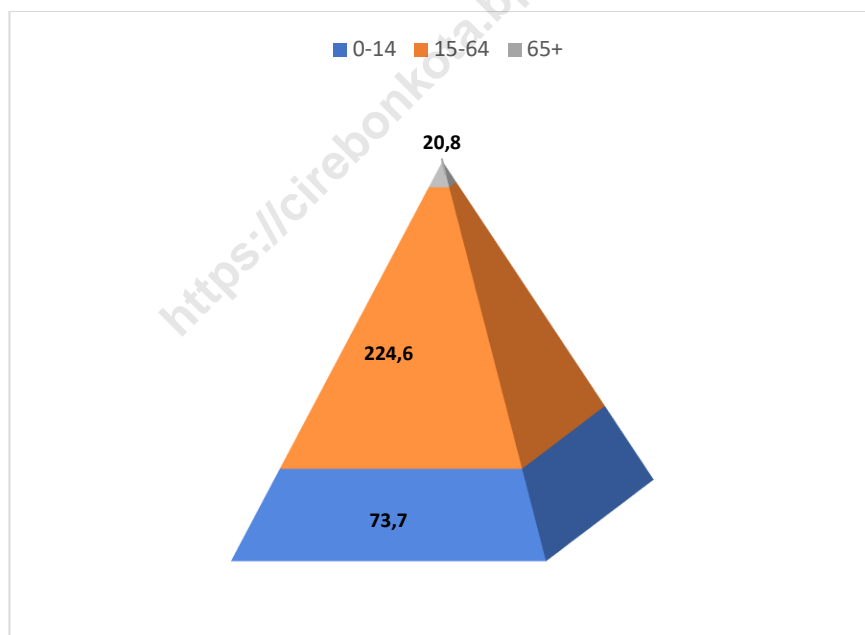
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan penduduk usia yang belum dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin rendahnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Penduduk Kota Cirebon pada tahun 2021 didominasi penduduk usia produktif, hal tersebut terlihat dari angka beban ketergantungan sebesar 42,07. Hal ini berarti

bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka beban ketergantungan pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan angka beban ketergantungan pada tahun 2020 (42,31)

Struktur umur penduduk Kota Cirebon didominasi oleh penduduk usia produktif. Persentase penduduk usia muda (0-14) tahun sebesar 23,10 persen. Persentase penduduk usia tua (65+) sebesar 6,52 persen. Sementara persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cirebon sangat potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan.

Grafik 3
Stuktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2021
 (000 jiwa)



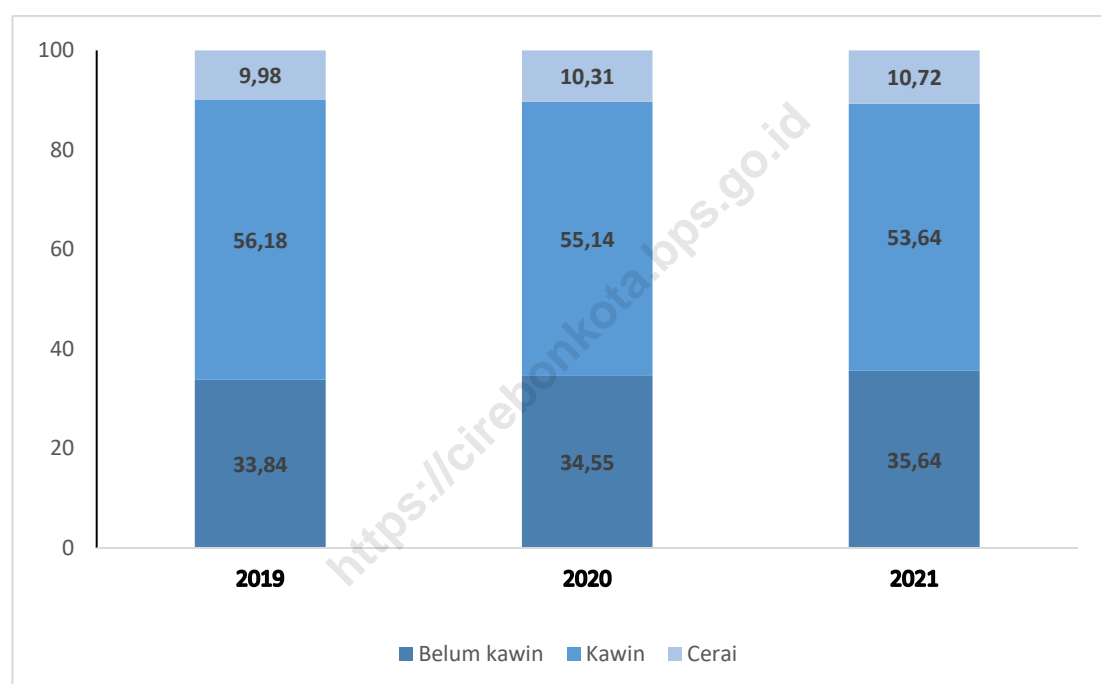
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

1.4 Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan.

Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2021, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin sebanyak 35,64 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 34,55 persen. Selanjutnya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin sebanyak 53,64 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,14 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus cerai adalah 10,72 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,31 persen.

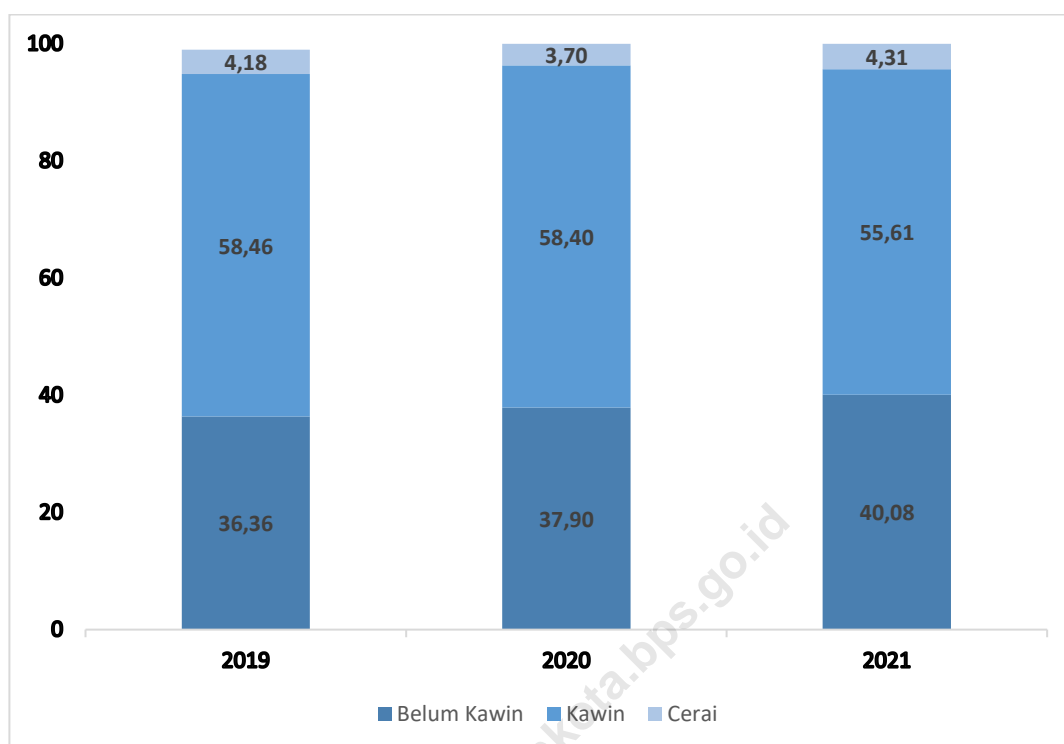
Grafik 4.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas
Berdasarkan Status Perkawinan, 2019-2021



Sumber: Susenas 2021

BPS membedakan penduduk usia produktif menjadi dua kategori, yaitu penduduk sangat produktif pada usia 15-49 tahun dan penduduk usia produktif pada usia 50-64 tahun. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2021, persentase penduduk di Kota Cirebon yang berusia 15-49 tahun dan berstatus belum kawin sebanyak 40,08 persen atau lebih tinggi dibandingkan persentase tahun 2020 yakni sebanyak 37,90 persen. Selanjutnya, persentase penduduk di Kota Cirebon yang berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin sebanyak 55,61 persen, lebih rendah dibandingkan persentase pada tahun 2020 yakni sebanyak 58,40 persen. Sementara penduduk usia 15-49 tahun yang berstatus cerai sebanyak 4,31 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase tahun 2020 yakni sebanyak 3,70 persen.

Grafik 5.
Persentase Penduduk 15-49 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019-2021



Sumber: Susenas 2021

1.5 Penggunaan Alat/ Cara KB

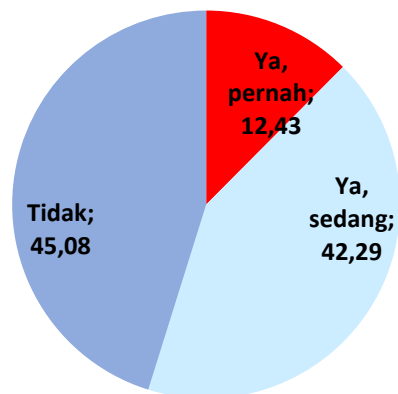
Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia dimulai dari perencanaan kehidupan berkeluarga, merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan, seribu hari pertama kehidupan, pendidikan anak usia dini sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (Bappenas, 2020).

Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya penduduk usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang mendapatkan bonus demografi dengan salah satu prasyarat yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran.

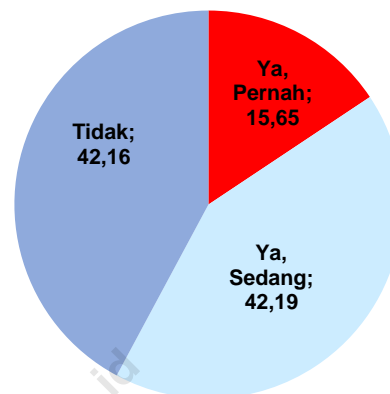
Grafik 6.

Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun 2020



Tahun 2021



Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2020 dan Tahun 2021, persentase perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun di Kota Cirebon yang sedang menggunakan alat/cara KB mengalami penurunan. Di dalam Renstra BKKBN Tahun 2020, menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern khususnya di kalangan kelompok usia produktif diperkirakan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan pasangan muda tentang kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya terhadap alat kontrasepsi.

Bab II Kesehatan

<https://cirebonkota.go.id>

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat Konstitusi tersebut memandatkan kepada negara untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Salah satu agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan dan kesehatan dan perbaikan gizi. Pembangunan manusia Indonesia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud.

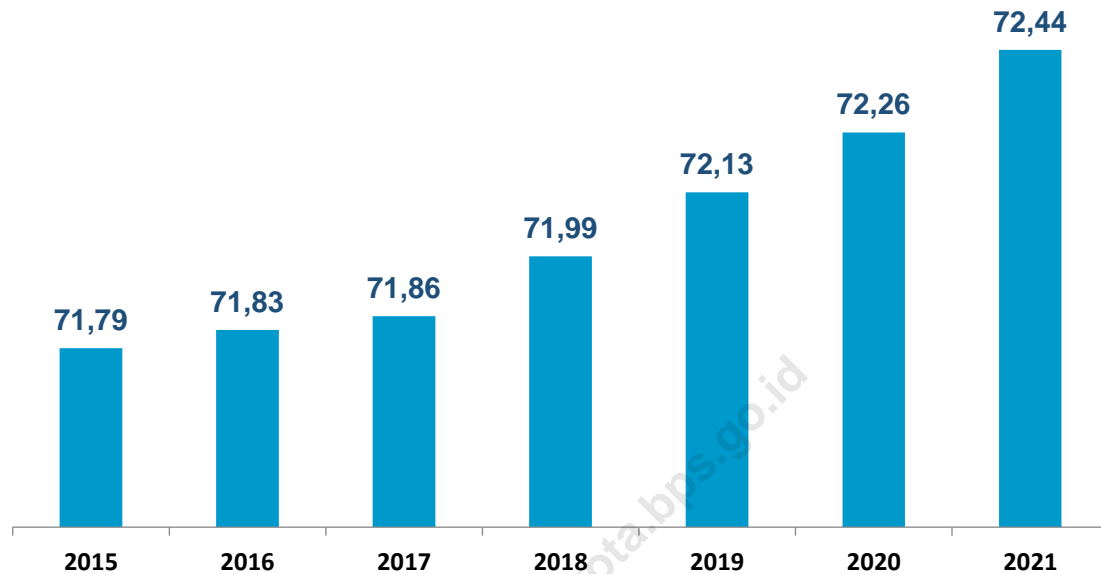
Sasaran pembangunan kesehatan yang dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umurharapan hidup saat lahir, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

2.1 Status Kesehatan

Umur harapan hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Kota Cirebon telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup penduduknya. Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2021, UHH terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, UHH penduduk Kota Cirebon sebesar 72,44. Artinya,

penduduk memiliki harapan hidup pada saat lahir hingga 72 tahun. Semakin tingginya umur harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cirebon mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Grafik 7. Umur Harapan Hidup Kota Cirebon, 2015-2021



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat 2021

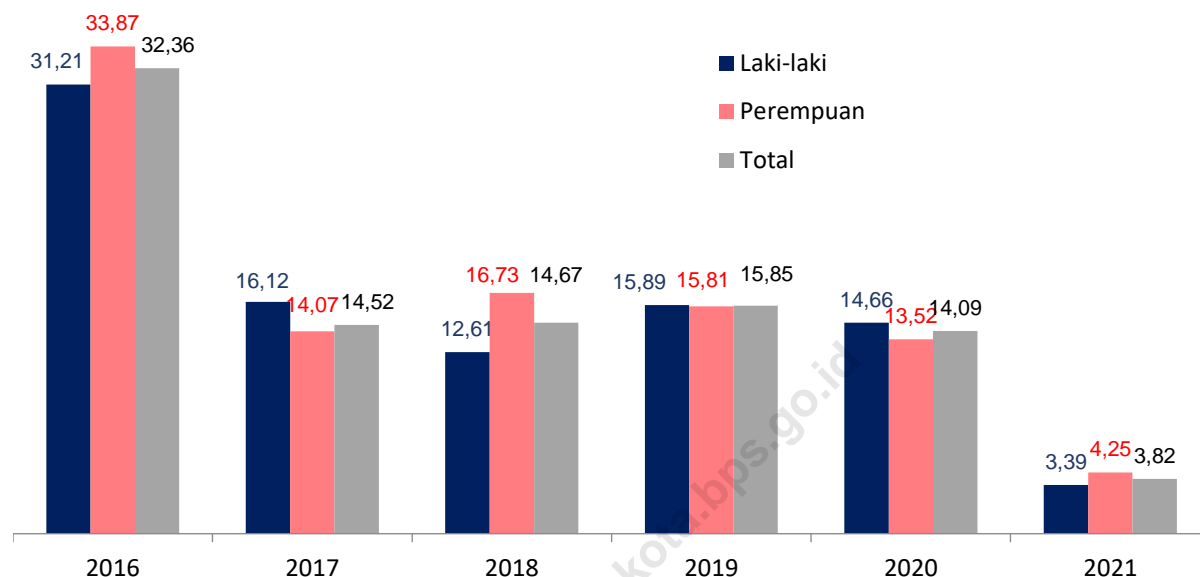
Peningkatan umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, semakin baiknya perilaku hidup sehat masyarakat dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ditambah lagi daya dukung kondisi lingkungan yang semakin baik.

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya (BPS).

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata.

Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Grafik 8. Angka Kesakitan, 2016-2021

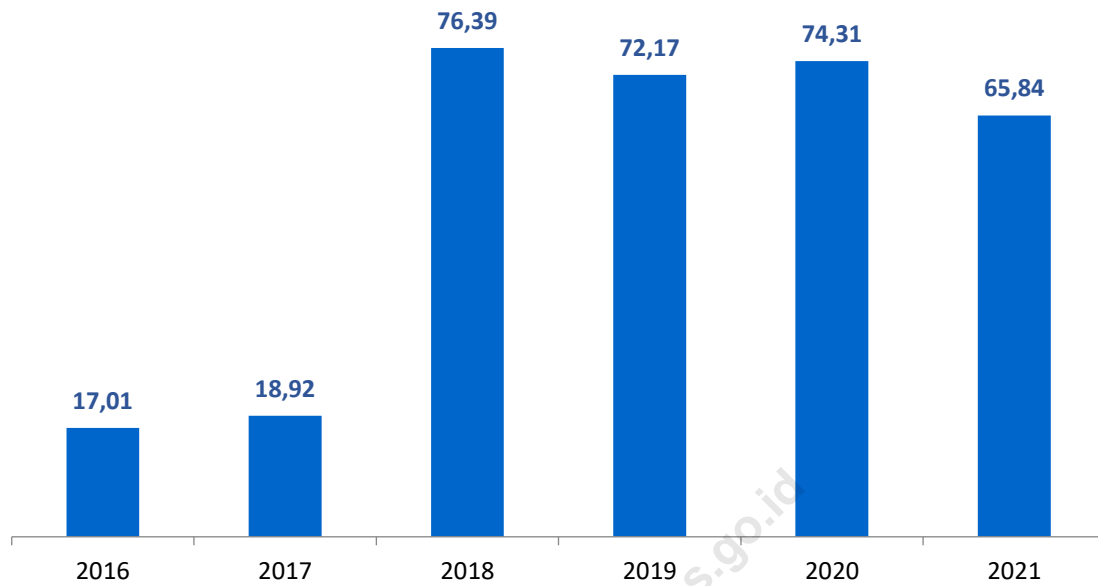


Sumber : Susenas 2016-2021

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021 angka kesakitan penduduk Kota Cirebon sebesar 3,82 persen. Angka tersebut memberi makna bahwa terdapat 4 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketika seseorang sakit, maka sudah tentu orang yang sakit tersebut akan mengoptimalkan ikhtiarnya untuk mengembalikan kesehatannya agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk mengembalikan kesehatannya salah satunya adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke anggota rumah tangga. Akibat dari berobat jalan tentunya seorang yang memiliki keluhan kesehatan harus membayar biaya berobat jalan selama proses penyembuhannya.

Grafik 9. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2016-2021



Sumber : Susenas 2016-2021

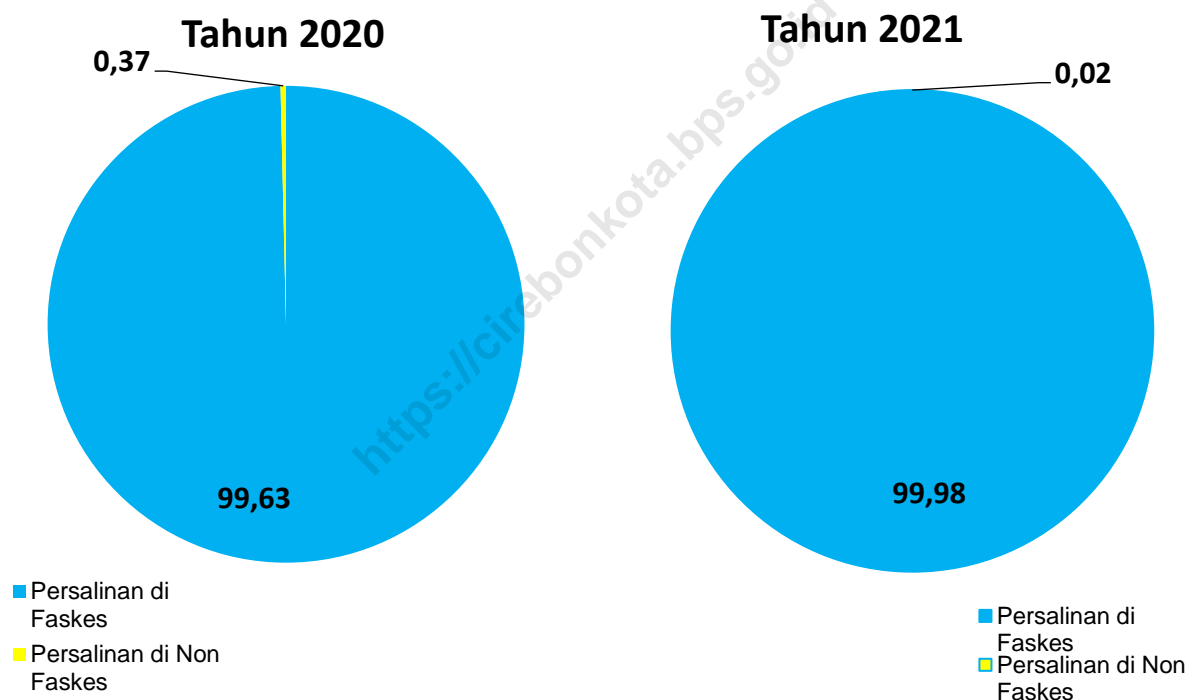
Akses biaya kesehatan yang murah dan mudah terjangkau merupakan harapan semua lapisan masyarakat. Pemerintah mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan semua orang memiliki akses layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik. Pada tahun 2020, persentase penduduk Kota Cirebon yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan sebesar 74,31 persen atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 persentase penduduk yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan mengalami penurunan menjadi 65,84 persen.

2.2 Penolong Persalinan

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka kematian ibu bisa disebabkan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang, sehingga perempuan melahirkan terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, atau terlalu tua. Selain itu, tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh persalinan yang ditolong oleh tenaga yang tidak kompeten dalam bidang kebidanan.

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Program Keluarga Harapan digulirkan untuk menjamin pemenuhan gizi ibu hamil dan pemenuhan kebutuhan persalinan terpenuhi.

Grafik 10. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir, 2020-2021



Sumber : Susenas 2020-2021

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kota Cirebon sudah tinggi. Sebanyak 99,98 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup yang terakhirnya di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi rumah sakit, klinik bersalin, dan puskesmas.

Bab III Pendidikan

<https://cirebonkota.go.id>

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain kemampuan membaca dan menulis, angka partisipasi sekolah (APS), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (AMH) atau *literacy rate*. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

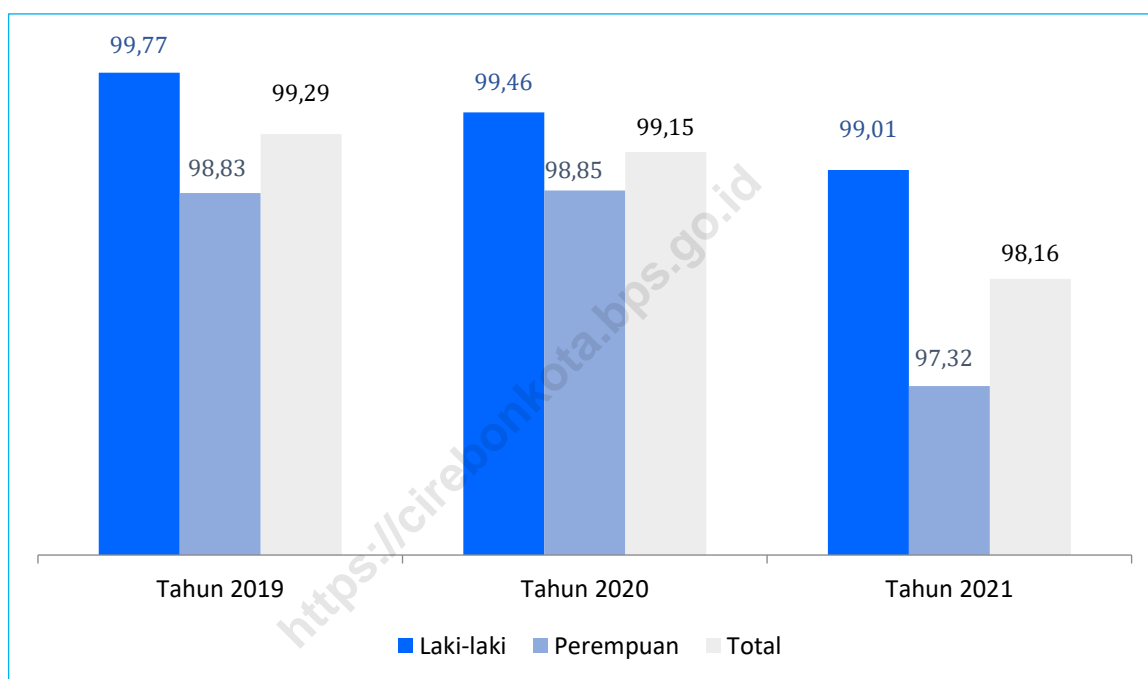
Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan komponen masyarakat yang potensial, yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Pada

tahun 2021, masih terdapat 0,84 penduduk yang belum dapat membaca dan menulis huruf latin.

Tingkat literasi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk perempuan.

Grafik 11.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019-2021



Sumber : Susenas 2019-2021

3.2 Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2021, masih terdapat sekitar 0,57 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Pada kelompok penduduk usia 13-15 tahun, masih terdapat sekitar 7,87 persen penduduk yang tidak

bersekolah. Selanjutnya, pada penduduk kelompok usia 16-18 tahun masih terdapat 25,51 persen penduduk yang tidak bersekolah.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya.

Tabel 1. APS dan APM Penduduk Kota Cirebon, 2019-2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	2019	2020	2021
7-12 tahun	99,55	99,87	99,43
13-15 tahun	92,57	92,94	92,13
16-18 tahun	75,85	75,16	74,49
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	95,45	95,29	95,15
SMP	70,54	70,79	69,96
SMA	66,85	66,75	67,64

Sumber: Susenas 2020-2021

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2021, capaian APM usia SD di Kota Cirebon adalah 95,15 persen. APM SMP mencapai 69,96 persen, artinya masih ada sekitar 30 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, kondisi APM pendidikan menengah pertama mengalami penurunan. APM usia SMA baru mencapai 67,64 persen artinya masih ada sekitar 32 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA. APM usia SMA pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2020.

**Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Penduduk Kota Cirebon Menurut Gender, 2019-2020**

Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia 25+ tahun)	10,47	10,48	9,31	9,33	9,90	9,91
Harapan Lama Sekolah (penduduk usia 7+ tahun)	12,78	12,79	13,40	13,41	13,11	13,12

Sumber: BPS Kota Cirebon

Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Meningkatnya harapan lama sekolah dapat diartikan bahwa semakin baik peluang penduduk untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di tahun 2020, harapan lama sekolah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan menjadi 13,12 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2019 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan masyarakat suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020 mencapai 9,91. Nilai tersebut memberi makna bahwa secara rata-rata penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020 yang berusia diatas 25 tahun telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA kelas 1 tapi tidak selesai.

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab IV

Ketenagakerjaan

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain jumlah usia kerja, jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

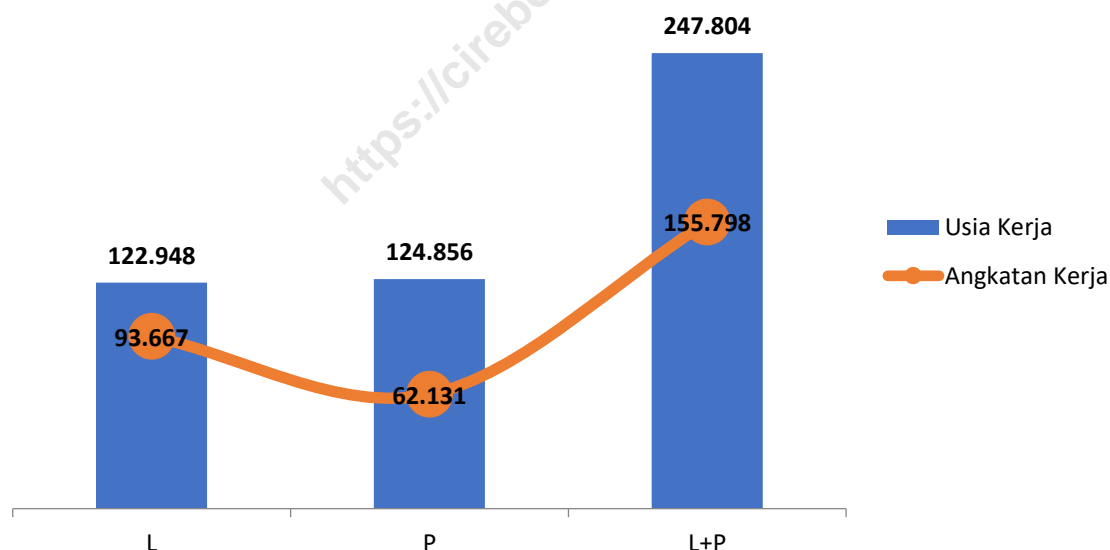
Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga

mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cirebon Agustus 2021 sebanyak 247.804 orang. Jumlah penduduk laki-laki usia kerja pada periode Agustus 2021 sebesar 122.948 orang. Sedangkan untuk penduduk perempuan usia kerja sebesar 124.856 orang.

Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2021 mencapai 155.798 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 92.006 orang.

Grafik 12. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja, 2021



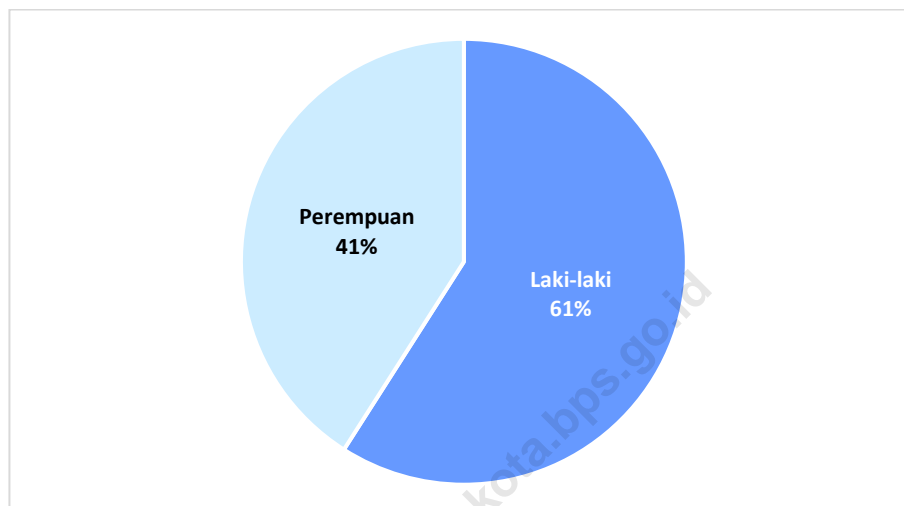
Sumber: Sakernas Agustus 2021

Dari total angkatan kerja sebanyak 155.798 orang pada Agustus 2021, sebanyak 89,47 persennya melakukan aktivitas bekerja atau sebanyak 139.397 orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka jumlah penduduk bekerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada keadaan Agustus 2021 jumlah penduduk bekerja laki-laki mencapai 82.310 orang, sedangkan perempuan sebanyak 57.087 orang.

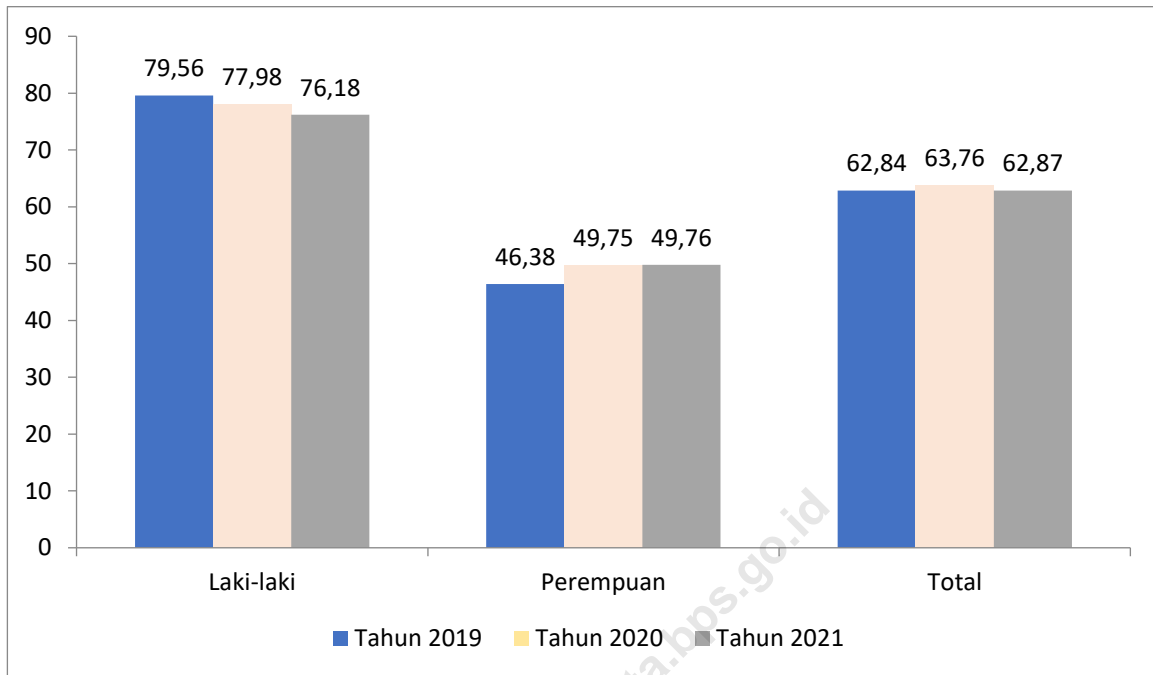
Grafik 13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Sakernas, Agustus 2021

Terdapat perbedaan pergerakan TPAK menurut jenis kelamin antara Agustus 2021 dengan tahun sebelumnya. TPAK laki-laki menunjukkan penurunan dari 77,98 persen pada Agustus tahun 2020 menjadi 76,18 persen pada Agustus tahun 2021. Sedangkan TPAK perempuan menunjukkan peningkatan dari 49,75 persen pada Agustus tahun 2020 menjadi 49,76 persen pada Agustus tahun 2021. Secara keseluruhan TPAK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari 63,76 persen pada Agustus tahun 2020 menjadi 62,87 persen pada Agustus tahun 2021. Tahun 2021, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

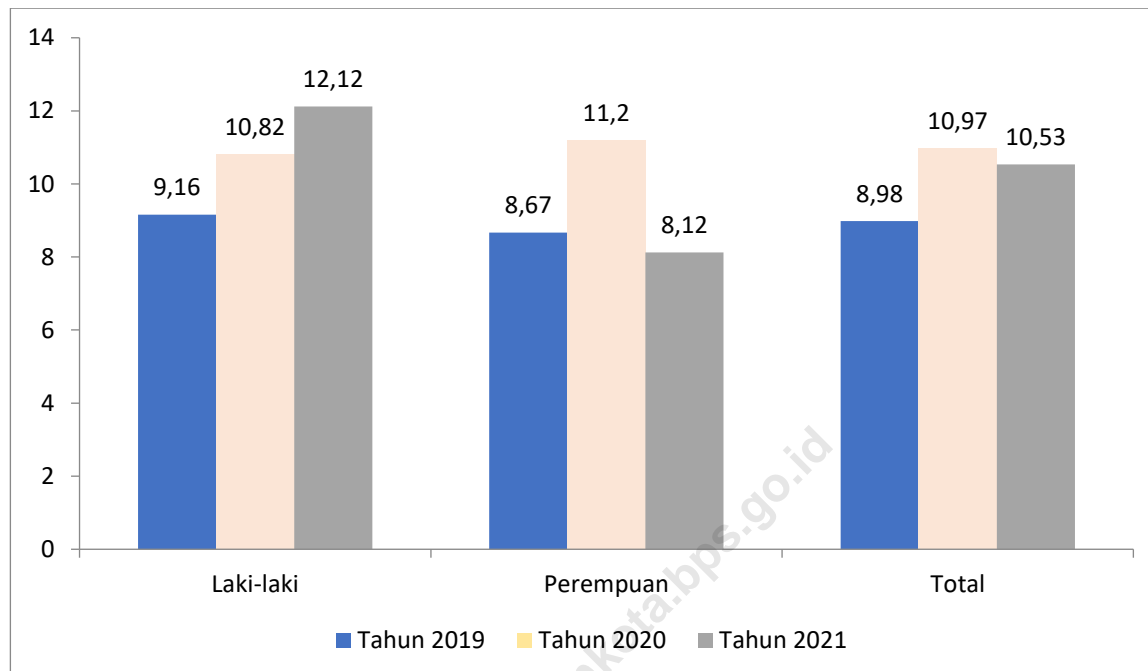
Grafik 14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021



Sumber: Sakernas, Agustus 2019- 2021

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) keadaan Agustus 2021 di Kota Cirebon mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2019, yaitu 10,97 persen pada tahun 2020 menjadi 10,53 persen pada tahun 2021. Apabila dipilah menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami peningkatan yaitu dari 10,82 persen di tahun 2020 menjadi 12,12 persen di tahun 2021. Sebaliknya, TPT perempuan mengalami penurunan, yaitu 11,2 persen pada keadaan Agustus 2020 menjadi 8,12 persen pada keadaan Agustus 2021.

Grafik 15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021



Sumber: Sakernas, Agustus 2019- 2021

Bab V

Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan, 2018-2021

Kelompok Barang	2019	2020	2021
Makanan	673.891	654.100	669.035
Non Makanan	821.159	820.119	960.673
Total	1.495.050	1.474.219	1.629.708

Sumber: Susenas Maret 2018-2021

Sesuai dengan karakter perkotaan, di Kota Cirebon, persentase pengeluaran perkapita untuk kelompok non makanan masih mendominasi pengeluaran rumah tangga. Berdasar data Susenas antar tahun, dapat dicermati bahwa proporsi pengeluaran kelompok non makanan terus membesar di tahun 2021.

<https://cirebonkota.bps.go.id>

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab VI

Perumahan dan Lingkungan

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, dan papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga rumah dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

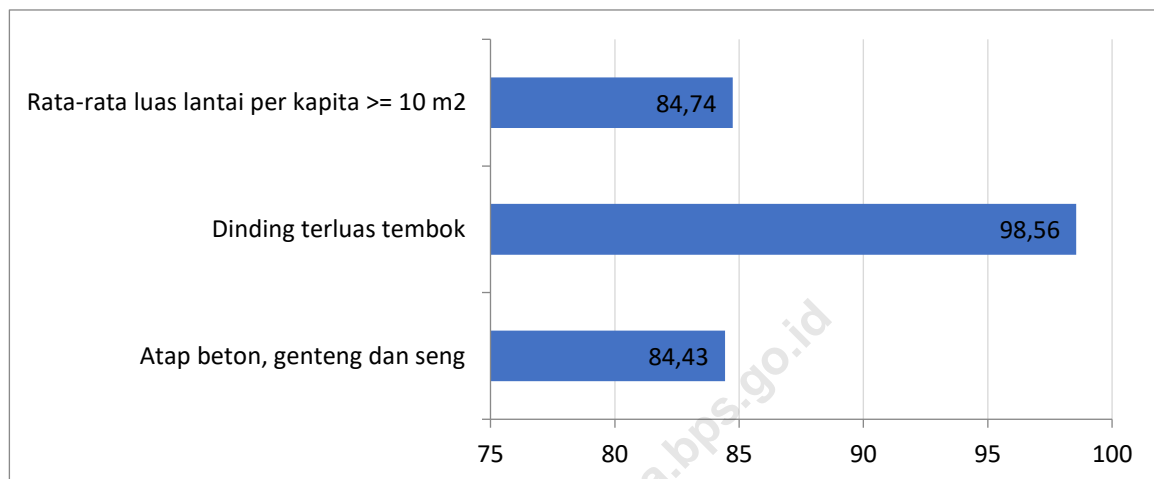
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hunian layak memiliki 4 kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan; 2. Kecukupan luas tempat tinggal; 3. Memiliki akses air minum; 4. Memiliki akses sanitasi layak.

Data hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa terdapat 98,56 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di bangunan rumah dengan dinding terluas dan tembok. Selanjutnya, terdapat 84,43 persen rumah tangga yang tinggal di bangunan

rumah dengan atap dari beton, genteng, dan seng. Sementara itu, terdapat 93,23 persen rumah tangga yang tinggal di bangunan dengan lantai rumah terluas adalah marmer, keramik, dan ubin.

Grafik 16.

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021

Menurut standar *World Health Organization* (WHO) tentang rumah layak huni menyebutkan bahwa rumah yang sehat adalah rumah dengan luas per kapitanya sebesar 10 m^2 per orang. Artinya dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari 4 (empat) orang maka rumah yang sehat menurut ukuran WHO, rumah tangga tersebut harus memiliki rumah idealnya minimal dengan luas 40 m^2 . Adapun menurut Kementerian Kesehatan standar rumah sehat adalah dengan luas per kapitanya sebesar 8 m^2 per orang. Di samping tingkat derajat kesehatan penghuninya, luas lantai juga sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan/status sosial penghuninya. Semakin luas lantai yang dimiliki oleh suatu rumah tangga maka asumsinya semakin sehat dan sejahtera penghuninya. Bila merujuk pada standar WHO di mana luas per kapita ideal (minimal 10meter persegi) maka persentase rumah tangga di Kota Cirebon dengan luas per kapita ideal sebesar 84,74 persen.

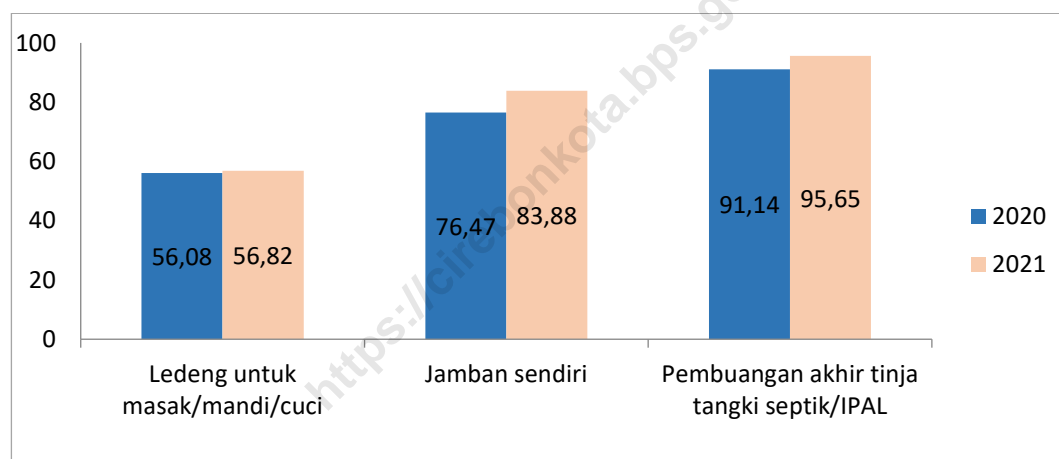
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan

menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Sepuluh rumah tangga di Kota Cirebon tahun 2021 untuk keperluan masak/mandi/cuci menggunakan air ledeng, yaitu sebesar 56,82 persen. Selebihnya untuk keperluan mandi/cuci, rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa, sumur/mata air terlindung, dan sumur/mata air tak terlindung, serta air kemasan.

Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2020-2021



Sumber: Susenas 2020-2021

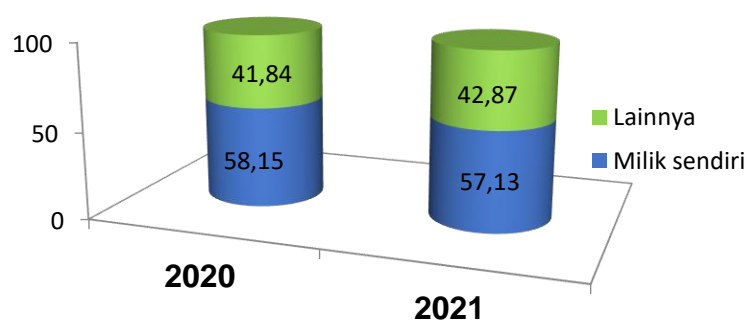
Selain fasilitas ketersediaan air bersih, sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang harus diperhatikan. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2020-2021 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban yang digunakan sendiri mengalami peningkatan dari 76,47 persen menjadi 83,88 persen. Selain penggunaan jamban untuk digunakan sendiri, tersedianya jamban dengan fasilitas tangki septik/IPAL merupakan bagian kriteria rumah sehat. Pada tahun 2021 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan fasilitas tangki septik/IPAL sebesar 95,65 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 91,14 persen. Peningkatan persentase dua indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas rumah sehat rumah tangga di Kota Cirebon.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2020-2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2020 dan 2021

Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah dengan status menempati rumah milik sendiri sebesar 57,13 persen. Status kepemilikan rumah tetap tidak akan mencapai 100 persen, hal ini dikarenakan adanya penduduk yang tidak tinggal di suatu daerah secara permanen bukan karena ketidakmampuan memiliki rumah di tempat tersebut.

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab VII

Kemiskinan

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, di mana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya.

Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

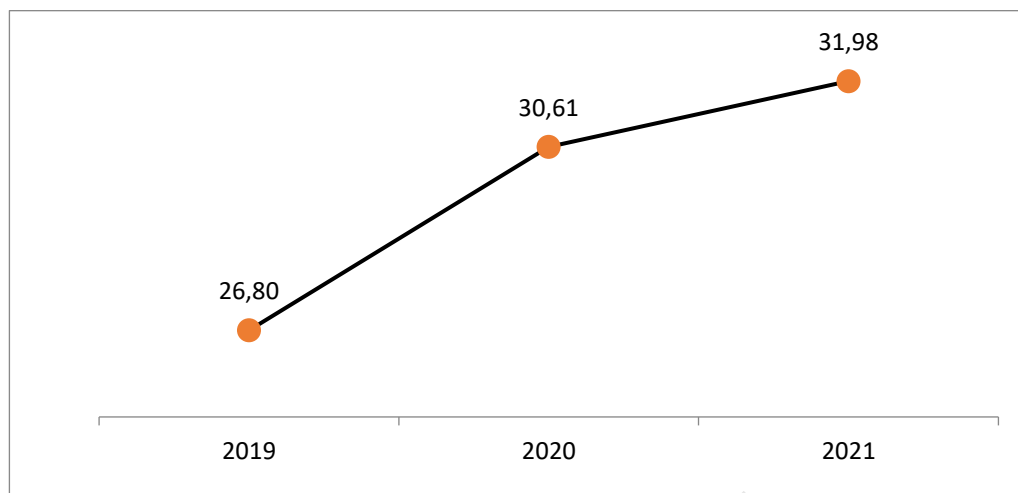
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Cirebon gencar menekan angka kemiskinan. Namun pandemi Covid-19 telah membuat persentase tersebut mengalami kenaikan.

Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin sebesar 26,80 ribu orang atau sebesar 8,41 persen dari penduduk Kota Cirebon. Selanjutnya, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin berbalik arah, mengalami peningkatan menjadi 30,61 ribu orang atau 9,52 persen. Demikian juga pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 31,98 ribu orang atau 10,03 persen.

Grafik 19.

Jumlah Penduduk Miskin, 2019-2021 (Maret, ribu jiwa)



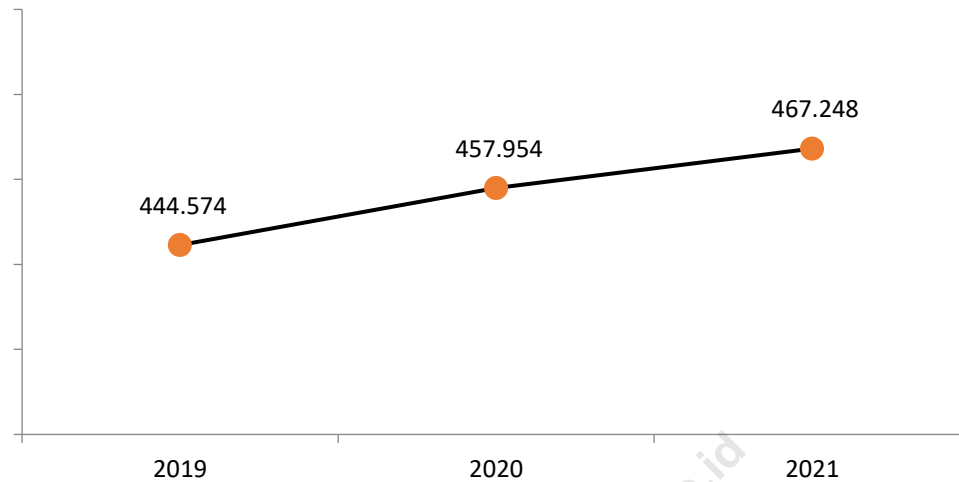
Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019-2021

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2019-2020. Garis kemiskinan tahun 2019, sebesar Rp 444.574 per kapita per bulan. Tahun 2020, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi Rp. 457.954 per kapita per bulan. Selanjutnya pada tahun 2021, garis kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp. 467.248 per kapita per bulan.

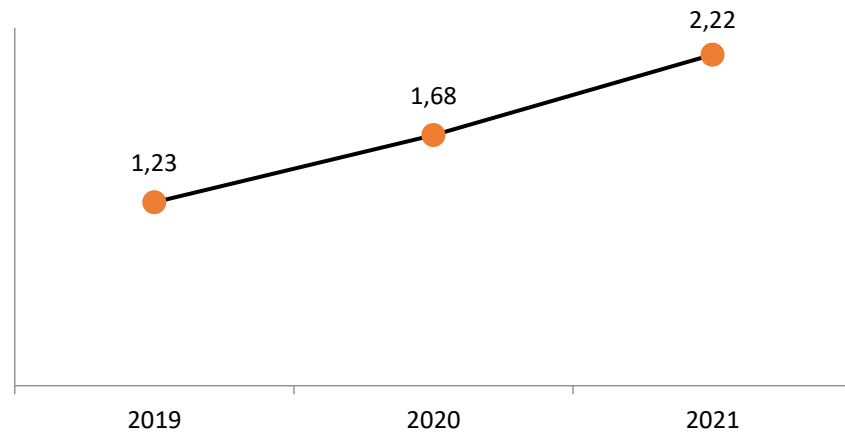
Grafik 20.
Garis Kemiskinan, 2019-2021
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019-2021

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2019–2021 P1 mengalami peningkatan. Nilai P1 pada tahun 2019 sebesar 1,23 selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1,68 dan pada tahun 2021 sebesar 2,22. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Kondisi yang diharapkan adalah nilai P1 yang semakin kecil, artinya penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

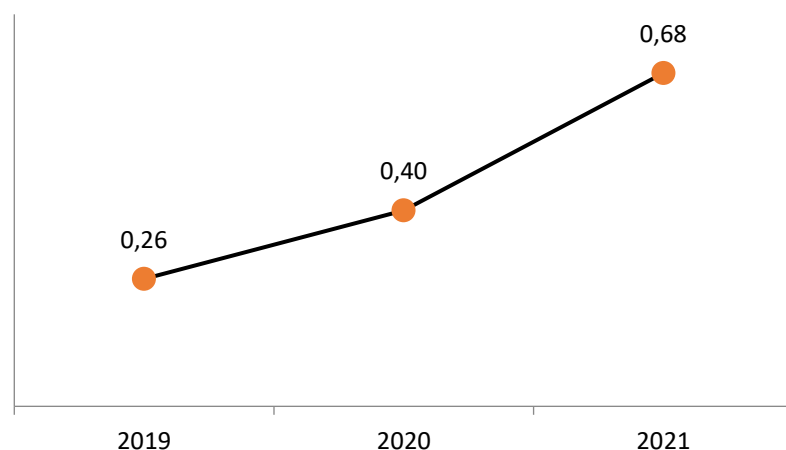
Grafik 21.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2019-2021



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019-2021

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan nilai P1, nilai P2 juga mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Nilai P2 pada tahun 2019 sebesar 0,26, pada tahun 2020 nilai P2 meningkat menjadi 0,40 dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,68. Peningkatan nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi.

Grafik 22.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2019 - 2021



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019-2021

Bab VIII

Sosial Lainnya

<https://cirebonkota.bps.go.id>

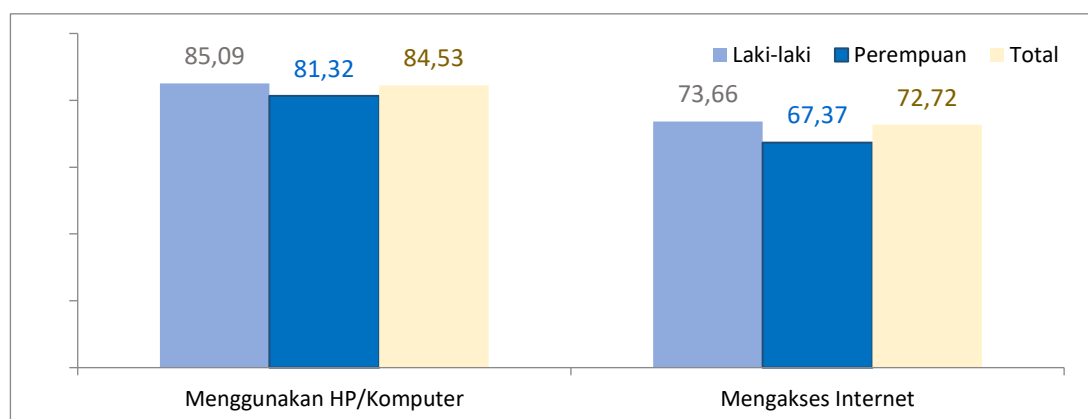
8.1. Teknologi Informasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*mobile phone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas alat teknologi informasi berupa telepon seluler. Saat ini mayoritas penggunaan telepon seluler selain digunakan sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses internet. Telepon seluler selain mudah dibawa, praktis, bersifat pribadi, juga memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Hal inilah yang membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat.

Teknologi dalam telepon seluler semakin canggih. Selain dapat digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan tugas kantor, menyimpan file, mengedit dan menyimpan gambar, menikmati hiburan film dan lagu, dan lain-lain. Fitur-fitur yang tersedia dalam telepon seluler sudah mendekati fitur yang ada di dalam komputer. Apalagi dengan kemudahan akses internet, dunia seperti dalam genggam tangan. Di tahun 2021, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler/ komputer di Kota Cirebon mencapai 84,53 persen. Presentase penduduk laki-laki yang menggunakan HP/komputer cukup tinggi, yaitu mencapai 85,09 persen. Sementara persentase penduduk perempuan yang menggunakan HP/Komputer sebesar 81,32 persen.

Grafik 23.

Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2021



Sumber: Susenas Maret 2021

8.2 Perlindungan sosial

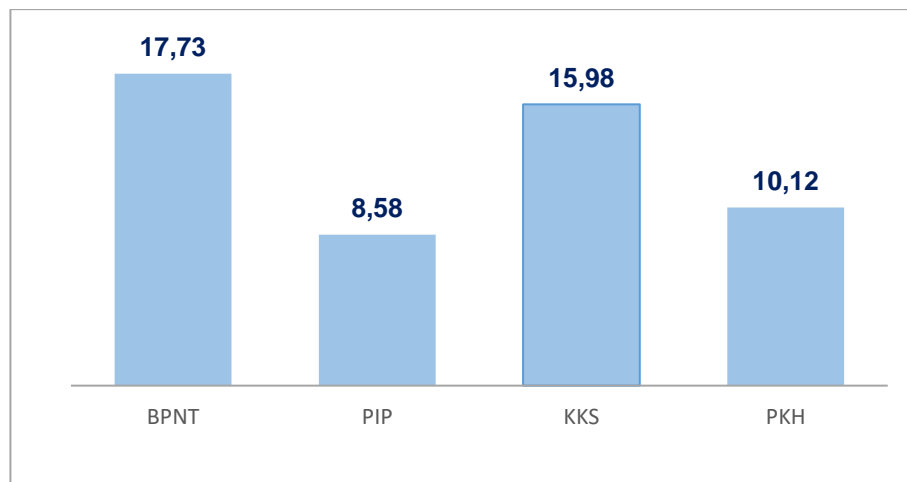
Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Berpijak dari sana, pemerintah berusaha mewujudkan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Pasca krisis ekonomi 1998, program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah semakin beragam. Tak hanya jaminan kesehatan, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah, bantuan beras untuk masyarakat miskin, dan bantuan langsung tunai. Pemerintah juga mencanangkan berbagai program antaralain program keluarga harapan, PNPM Mandiri, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem perlindungan sosial.

Pada tahun 2019, pemerintah menyusun program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Empat program yang digulirkan adalah Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selanjutnya, pemerintah meluncurkan program baru yaitu kartu prakerja dan bantuan subsidi gaji. Berdasar data hasil Susenas Maret Tahun 2021, ada sebanyak 17,73 persen rumah tangga di Kota Cirebon yang menerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Selanjutnya, ada sebanyak 8,58 persen rumah tangga yang salah satu anggotanya merupakan penerima Program Indonesia Pintar. Rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tercatat sebanyak 15,98 persen, namun tidak semua dapat menunjukan kartunya. Sementara itu, terdapat 10,12 persen rumah tangga di Kota Cirebon yang pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan.

Grafik 24.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial, 2021



Sumber: Susenas Maret Tahun 2021

<https://cirebonkota.bps.go.id>